

Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals (SDGS)* Desa Dalam Meningkatkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024

Danang Prio Utomo¹, Muhamad Ali², Nadia Atma Sholihah³, Elma Bakti Asih⁴.

Pendidikan Ekonomi, FISE. Universitas Hamzanwadi

Correspondence: danang@hamzanwadi.ac.id

Received: 02 November 2025 | Revised: 27 November 2025 | Accepted: 21 Desember 2025

Keywords:

Sustainable Development Goals (SDGs), Decent Work, and Economic Growth

This study aims to: 1) Determine the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in increasing decent work and economic growth in East Lombok Regency, 2) Determine the evaluation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in increasing decent work and economic growth in East Lombok Regency. This study is a qualitative descriptive study, using data collection techniques such as observation, interviews, questionnaires, and documentation in three villages. 20 respondents were selected using purposive sampling techniques, using Miles and Huberman data analysis techniques. Then, the data were analyzed using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results, which refer to eight indicators: socialization, knowledge, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of program targets. Therefore, it can be concluded that the implementation of the Village Sustainable Development Goals (SDGs) program to increase decent work and economic growth in East Lombok Regency has been carried out in accordance with applicable provisions and regulations. However, Goal 8 has not been implemented properly due to problems or shortcomings. Therefore, the evaluation of the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program is considered ineffective because most villages and communities have not yet felt the positive impact of the pre-employment card distribution program and the training provided by the vocational training centers.

Kata Kunci:

Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (TPB),
Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan
Ekonomi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam meningkatkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, 2) Mengetahui evaluasi program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam meningkatkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi pada 3 desa dan 20 responden diambil berdasarkan teknik purposive sampling dengan teknik analisis data Miles dan huberman dan Kemudian dianalisis dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada 8 indikator yaitu: sosialisasi, pengetahuan, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsitivitas, dan ketepatan sasaran terhadap sasaran program. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, namun untuk tujuan ke-8 belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat masalah atau kekurangan. Oleh sebab itu, evaluasi program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dikatakan tidak efektif karena Desa dan masyarakat sebagian besar belum merasakan dampak positif dari program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja tersebut.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program pembangunan yang berfokus pada pilar sosial masyarakat, kesejahteraan ekonomi, lingkungan hidup, dan hukum pemerintah. Tujuan SDGs Desa, ditetapkan oleh praturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan integrasi desa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seluruh desa yang ada di indonesia (Boekoesoe & Septian Maksum,2022).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah upaya komprehensif untuk membangun desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya. SDGs mencakup 18 tujuan dan target pembangunan berkelanjutan, termasuk desa bebas kemiskinan, desa bebas kelaparan, desa yang makmur dan maju, desa dengan luas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, dan desa yang tidak memiliki kemiskinan atau kelaparan (Husain et al.,2022).



Gambar 1. Program SDGs Desa

Sumber: Sistem informasi SDGs Lombok Timur

Salah satu tujuan dari program ini yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini termasuk permasalahan serius dan harus segera diatasi di Indonesia. Beberapa masalah yang dibahas antara lain adalah kesempatan kerja yang tidak memadai, rendahnya sumber daya manusia, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Pekerjaan yang layak berarti pekerjaan yang diakui dan dilengkapi dengan hak-hak dan jaminan sosial, lingkungan kerja yang baik, dan nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan keterlibatan. Ini berarti pekerja memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak, bekerja di lingkungan yang aman dan sesuai, serta diperlakukan dengan bermartabat dan hormat (Ratu et al., 2023). Salah satu cara paling umum untuk mengukur keberhasilan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi; hal ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto di tingkat regional yaitu; provinsi dan kabupaten/kota menandakan kemampuan suatu daerah untuk memperoleh output dalam

jangka waktu tertentu. PDRB biasanya diartikan sebagai keseluruhan dari nilai tambah yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau menggambarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh oleh seluruh wilayah perekonomian PDB dihitung dengan dua metode; dan penggunaan (Ria et al., 2022).

Tabel 1.
PDRB per Kapita Provinsi NTB

Wilayah kabupaten/kota	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat(Ribu Rupiah)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Lombok Barat	20254	21054	22251`
Kabupaten Lombok Tengah	16156	16849	18023
Kabupaten Lombok Timur	15152	15666	16539
Kabupaten Sumbawa	28442	28991	30503
Kabupaten Dompu	29864	30810	32638
Kabupaten Bima	22241	22783	24122
Kabupaten Sumbawa Barat	156835	160076	207626
Kabupaten Lombok Utara	18458	18753	19697
Kota Mataram	43460	45591	48770
Kota Bima	26658	2752	29071

Sumber: Badan Pusat Statistik kategorie

Dengan kategori jumlah penduduk terpadat di dunia, berdasarkan data yang diperoleh dari Sumber Badan Pusat Statistikn (BPS) menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia akan meningkat 1,05% dari tahun sebelumnya, mencapai 278,7 juta orang. Pengangguran adalah salah satu masalah yang muncul sebagai akibat dari populasi yang besar di Indonesia. Salah satu indikator tingginya angka pengangguran yaitu panjangnya waktu yang diperlukan oleh pencari kerja sehingga bisa mendapatkan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran mungkin muncul karena efek yang disebabkan karena adanya perubahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lebih banyak kesempatan kerja yang tersedia (Rahima et al., 2022).

Untuk mencapai lapangan pekerjaan yang layak sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan potensi sumber daya sehari-hari diharapkan mampu untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih baik, memanfaatkan sumber daya alam lokal dan mengembangkan sumber daya manusia, serta meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian tentang ketersediaan tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun regional, harus dilakukan berdasarkan perkiraan tenaga kerja, yang terutama meliputi perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Penduduk Usia Kerja (PUK), dan Angkatan Kerja (AK) , Perkiraan ini sangat erat terkait dengan perkiraan pertumbuhan penduduk, migrasi masuk, migrasi keluar, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian (Alfarizi, 2021). Tingkat pengangguran terbuka/TPT nasional Agustus 2023 tercapai rata-rata 5,32%,

dengan nilai upah tenaga kerja yaitu sebesar 3.18 juta rupiah per bulan. Persentase pengangguran di Nusa Tenggara Barat berada di urutan ke-26, yaitu 3,73%, jauh dibawah rata-rata TPT. Salah satu penyebab pengangguran ini adalah kurangnya modal untuk berinvestasi, yang mengakibatkan kekurangan lapangan kerja yang layak. Hal ini menghalangi karyawan untuk berinovasi dan mengandalkan perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan daripada berusaha sendiri (Hartati & Bahri, 2022). Konfrensi Pekerja Internasional (ILO) membuat agenda untuk menciptakan pekerjaan layak, yang mencakup pilar strategis yaitu; dengan hak ditempat kerja, pekerjaan yang produktif, hak atas perlindungan sosial, dan dialog sosial. Selain itu, *International Labour Organization* (ILO) mengatakan bahwa pekerjaan layak dapat didasarkan pada indikator: memiliki kesempatan kerja; pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif, jam kerja yang layak; menggaabungkan pkerjaan, pekerjaan, dan pendidikan (Santoso & Usman, 2020).

Tabel 2.
Tingkat pengangguran terbuka provisni NTB

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB		
	2022	2023	2024
Lombok Barat	4.16	3.12	2.75
Lombok Tengah	3.02	2.78	2.55
Lombok Timur	1.51	2.47	2.73
Sumbawa	2.11	2.79	2.67
Dompu	2.50	2.36	2.3
Bima	2.28	2.16	3.15
Sumbawa Barat	4.56	3.54	2.73
Lombok Utara	0.38	1.40	2.73
Kota Mataram	6.03	4.78	4.85
Kota Bima	3.73	3.57	3.65
Nusa Tenggara Barat	2.89	2.80	2.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat

Memiliki pekerjaan yang layak sangat penting untuk mengingatkan kemakmuran masyarakat karena selain memberikan penghasilan yang cukup, pekerjaan yang layak juga dapat membuka jalan dalam mengingatkan prekonomian dan kondisi sosial yang brkualitas dapat memperkuat masing-masing individu, ranah keluarga, serta masyarakat. Pekerjaan layak merangkum aspirasi masyarakat terhadap kehidupan mereka (Alfino Nialda et al., 2022). Namun, berdasarkan realitas di masyarakat, sebagain besar masayrakat masih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, masyrakat terus bekerja di pekerjaan yang tidak memenuhi standar pemerintah tentang apa yang disebut sebagai pekerjaan yang layak. Hal ini dikarenakan masih adanya pelanggaran-pelanggaran ditempat kerja yang dapat mengindikasikan bahwa dinas tnga kerja belum melakukan tuganya dengan baik. Relevansi dari penelitian yang dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Mery Ismowati, Sirojudin Abbas, dan Anisa Putri pada tahun 2022 yang berjudul “ Sosialisasi Peran Pemuda Dalam SDGs Goals 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mensosialisasikan peran-peran yang harus dijalankan oleh pemuda selaku prantara UMKM, terutama pada SDGs tujuan 8 yaitu mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif da berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui “ Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengingatkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024”. Adapun indikator untuk mengetahui evaluasi program tersebut, yaitu; sosialisasi program, pengetahuan terkait program, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/ kesamaan, responsitivitas, ketepatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan rentang waktu Juni–Agustus 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada kepala Desa dan tenaga kerja serta data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal, dan arsip yang relevan. Populasi penelitian melibatkan seluruh desa yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 239 desa, penentuan jumlah sampel dengan purposive sampling meliputi 3 desa dan 20 tenaga kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, serta triangulasi sumber dan metode .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Hasil wawancara bahwa pelaksanaan program SDGs, rata-rata desa-desa tersebut sudah melaksanakan sebagian besar tujuan dari program SDGs tersebut, terutama mengenai tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, desa sudah mengikuti program penyaluran kartu prakerja dan mengikuti pelatihan di BLK .

Dan diperkuat juga oleh hasil kuesioner bahwa sebagian besar menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program SDGs, rata-rata desa yang melakukan pendataan telah melaksanakan beberapa dari 18 tujuan SDGs,

2. Evaluasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi program SDGs, melalui Sosialisasi, pengetahuan terkait program, efektivitas, efisiensi program penyaluran kartu prakerja, kecukupan terhadap program SDGs, pemerataan/kesamaan, responsitivitas, ketepatan sasaran.

a. Sosialisasi program

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa, pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada desa terkait dengan program SDGs, dan terkait dengan tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi secara offline maupun secara online melalui platform resmi SDGs.

Dan di dukung oleh hasil kuesioner bahwa pada item pernyataan sosialisasi program SDGs terkait dengan penyaluran kartu prakerja dan balai latihan kerja pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan baik sehingga dapat memberikan informasi kepada desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan ke-8.

b. Pengetahuan terkait program

Hasil wawancara dan hasil kuesioner bahwa masyarakat sebagian besar sudah mengetahui program penyaluran kartu prakerja dan balai latihan kerja.

c. Efektivitas program

Hasil wawancara dan kuesioner menyatakan bahwa efektivitas, program SDGs Desa sudah menunjukkan adanya kemajuan, tetapi belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

d. Efisiensi Program

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa penggunaan sumbr daya yang telah di berikan tidak digunakan sebaik mungkin melainkan digunakan untuk hal yang tidak semestinya.

Dan diperkuat oleh hasil kuesioner menyatakan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa program SDGs yang dikung oleh penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja tingkat efisiensinya masih terbilang rendah.

e. Kecukupan/ kepuasan program

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa masyarakat penerima penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja merasa program dari pemerintah tersebut belum dikatakan kuat untuk menjamin masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dan diperkuat oleh hasil kuesioner sebagian besar responden menyatakan bahwa program tersebut belum bisa mengatasi tingginya tingkat pengangguran di desa.

f. Pemerataan/Kesamaan

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa program SDGs ini sangat memberikan dampak untuk masyarakat karena dari tujuan-tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun untuk tujuan SDGs khusunya yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang di dukung melalui program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja dampak yang dirasakan masyarakat masih belum dikatakan merata. Dan diperkuat oleh hasil kuesioner sebagian responden menyatakan bahwa manfaat dari program pemerataan untuk setiap desa untuk program penyaluran kartu prakerja dan balai latihan kerja belum bisa dikatakan merata untuk setiap lapisan masyarakat.

g. Responsitivitas

Tingkat responsivitas dalam program SDGs ini cukup baik namun belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah dilakukan bahwa sebagian besar masyarakat merespon positif terhadap program SDGs khususnya tujuan ke-8 melalui program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja, karna sebagian masayarakat merasa terbantu dengan adanya program tersebut meskipun ada sebagian masyarakat belum merasakan manfaatnya.

h. Ketepatan sasaran

Hasil wawancara dan kuesioner bahwa untuk program penyaluran kartu prakerja ketepatan sasarnya dikatakan tidak tepat karna tidak semua yang membutuhkan kartu prakerja bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu prakerja. Dan untuk program pelatihan balai latihan kerja sasarnya sudah tepat namun masih kurangnya kesadaran masayarakat untuk melatih skil sebelum masuk kedunia kerja karna dari itu masayarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun belum seluruhnya mencapai hasil yang optimal, khususnya pada tujuan ke-8 yaitu peningkatan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

- a. Indikator sosialisasi, pemerintah daerah telah berupaya memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media daring. Upaya ini cukup efektif karena sebagian besar aparatur desa memahami arah dan tujuan dari program SDGs.
- b. Indikator pengetahuan, bahwa masyarakat sudah mengenal adanya program SDGs, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kartu prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Pengetahuan ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja. Namun, pemahaman yang bersifat teknis, seperti mekanisme pendaftaran, syarat penerimaan, dan manfaat jangka panjang dari program, masih kurang. Hal ini menandakan perlunya peningkatan literasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan agar dapat berpartisipasi secara aktif.

2. Evaluasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

- a. Indikator efektivitas, program SDGs Desa sudah menunjukkan adanya kemajuan, tetapi belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Program pelatihan dan pembagian kartu prakerja masih berorientasi pada kegiatan administratif dan jumlah peserta, belum pada hasil nyata berupa peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kurangnya pendampingan pasca pelatihan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh untuk menciptakan aktivitas ekonomi produktif.
- b. Indikator efisiensi juga masih menjadi tantangan. Penggunaan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga belum sepenuhnya optimal. Sebagian responden

- menilai bahwa program belum dijalankan dengan pengelolaan yang efektif, karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan hasil yang diperoleh.
- c. indikator kecukupan atau kepuasan masyarakat, program SDGs desa dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pelatihan kerja yang diberikan belum berkelanjutan, sehingga tidak cukup untuk meningkatkan peluang kerja jangka panjang
 - d. Indikator pemerataan, program SDGs sudah mencakup sebagian besar wilayah desa, namun pemerataan manfaatnya masih belum optimal. Tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. Sebagian masyarakat telah memperoleh manfaat berupa peningkatan keterampilan dan peluang kerja, namun sebagian lainnya belum merasakannya karena keterbatasan informasi, sarana, dan kesempatan.
 - e. Indikator responsivitas masyarakat terhadap program SDGs tergolong baik. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa program tersebut bermanfaat dan berharap agar dapat terus dilanjutkan dengan perbaikan pada aspek teknis pelaksanaan. Namun demikian, respons yang positif ini belum diikuti oleh partisipasi aktif secara menyeluruh. Masih ada masyarakat yang bersikap pasif atau menunggu bantuan dari pemerintah tanpa inisiatif untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.
 - f. Indikator ketepatan sasaran masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan program. Program penyaluran kartu prakerja belum sepenuhnya tepat sasaran karena tidak semua penerima benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Sebaliknya, beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria justru tidak mendapatkan akses. Sementara itu, pelatihan di balai latihan kerja dinilai lebih tepat sasaran, tetapi masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan secara serius.
- g.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan jumlah pekerjaan layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan dan berjalan mengikuti peraturan yang berlaku, ditunjukkan melalui indikator yang telah disiapkan oleh penulis dalam mengevaluasi dari program SDGs oleh 3 desa di Kabupaten Lombok Timur. Desa yang diambil sebagai sampel penelitian telah melaksanakan program SDGs yang ditetapkan pemerintah berupa pembagian penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja, namun berdasarkan realitanya kedua program tersebut belum terlaksana dengan baik karena terdapat permasalahan atau kekurangan. Permasalahan dan kekurangan yang dimaksud adalah dalam pendistribusian kartu prakerja banyak penerima yang tidak tepat sasaran dan kuota penerima terbatas, selain itu dalam proses pendataan penerima kartu prakerja tersebut, pihak pendataan tidak dilakukan langsung oleh pihak desa, sehingga banyak masyarakat yang menyalahgunakan pembagian kartu prakerja tersebut. Sedangkan di Balai latihan kerja permasalahannya adalah kurangnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melatih keterampilan sebelum memasuki dunia

kerja. Evaluasi program SDGs oleh desa guna meningkatkan jumlah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dikatakan kurang efektif karena sebagian besar desa dan masyarakat belum merasakan dampak positif dari program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja. Pemerintah perlu lebih memaksimalkan program-program yang ditetapkan dan harus disesuaikan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dapat dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh pihak desa, masyarakat penerima kartu prakerja dan masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan balai latihan kerja, serta didukung dengan hasil kuesioner yang telah ditentukan oleh peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarizi, M. (2021). *Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 9(2), 112–120.
- Alfino, N., Nialda, A., & Wibowo, R. (2022). *Pekerjaan Layak sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Humaniora, 11(1), 45–56.
- Boekoesoe, Y., & Maksum, S. (2022). *Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Indonesia*. Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, 8(3), 210–220.
- Hartati, S., & Bahri, A. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Pengangguran di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(4), 67–79.
- Husain, S., Maulana, A., & Fitriah, L. (2022). *Strategi Pembangunan Desa Berkelanjutan Berdasarkan SDGs di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5(2), 133–144.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators*. Geneva: ILO Publications.
- Ratu, A. N., Lestari, P., & Hasan, M. (2023). *Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 12(1), 22–35.
- Ria, K., Putra, D., & Yulianti, S. (2022). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ekonomi Regional, 8(2), 77–86.
- Santoso, B., & Usman, M. (2020). *Pekerjaan Layak dan Produktivitas Kerja dalam Perspektif ILO*. Jurnal Ketenagakerjaan, 4(1), 34–46.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita Provinsi NTB 2021–2024*. Mataram: BPS NTB.